

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari perkembangan empat Kab/kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Musi Rawas Utara yang bukan merupakan Kabupaten inflasi sehingga perkembangan inflasi diperoleh dari Kota terdekat (sister city) yaitu Kota Lubuklinggau.

Oktober 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,78 persen; kelompok transportasi sebesar 0,25 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,79 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,34 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,56 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,29 persen.

November 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,74 persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,05 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,96 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,30 persen.

Desember 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,81 persen; kelompok transportasi sebesar 1,35 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,27 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,52 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,09 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,48 persen; kelompok perlengkapan, peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,67 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan pengendalian inflasi di Kab. Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

Ketergantungan pada Komoditas Tertentu

Jika perekonomian di Kab. Musi Rawas utara terlalu bergantung pada satu atau beberapa komoditas pertanian atau pertambangan, fluktuasi harga komoditas tersebut dapat sangat mempengaruhi inflasi.

Infrastruktur yang Belum Memadai

Keterbatasan infrastruktur di Kab. Musi Rawas Utara seperti jalan dan transportasi dapat menghambat distribusi barang dan jasa, yang dapat menyebabkan kenaikan harga.

Rantai Pasokan yang Panjang dan Kompleks

Rantai pasokan yang panjang dan melibatkan banyak perantara dapat meningkatkan biaya distribusi dan pada akhirnya mempengaruhi harga konsumen.

Kurangnya Diversifikasi Ekonomi

Jika ekonomi di Kab. Musi Rawas Utara kurang terdiversifikasi, guncangan ekonomi pada sektor tertentu dapat berdampak luas pada inflasi.

Koordinasi Antar Daerah yang Kurang Efektif

Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang baik, terutama dalam hal menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Informasi Pasar yang kurang Akurat

Informasi pasar yang kurang akurat dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat dalam pengendalian inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terus melakukan upaya-upaya konkrit dalam pengendalian inflasi di daerah. Adapun upaya konkrit pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pemantauan Perkembangan Harga

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara dan Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan perkembangan harga bahan pokok penting setiap hari di pasar lawang agung kecamatan rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, serta mengambil tindakan yang tepat untuk menstabilkan harga.

Pelaksanaan Operasi Pasar

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Polres Kabupaten Musi Rawas Utara, Camat, Bank Sumsel Babel, Bagian Prokopim, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian dan SDA bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi dengan cara melaksanakan Operasi Pasar guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Koordinasi antar Pemangku Kepentingan

Koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melakukan Rapat Rutin Pengendalian Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Musi Rawas Utara setiap hari senin melaksanakan rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi zoom meeting yang dihadiri Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan rapat koordinasi dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif dalam mengatasi masalah inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kab. Musi Rawas Utara, yang umumnya dikelola melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar kebijakan ini lebih efektif antara lain:

Efektivitas Operasi Pasar dan Stabilisasi Harga

Operasi pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Musi Rawas Utara bekerja sama dengan Bulog dan pelaku usaha terbukti mampu menekan lonjakan harga bahan pokok, terutama saat musim tertentu (misalnya bulan Ramadan dan akhir tahun).

Penguatan Koordinasi melalui TPID

TPID telah menjadi forum koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha untuk memantau pergerakan harga dan merancang kebijakan stabilisasi.

Perbaikan Infrastruktur dan Distribusi Barang

Pembangunan dan perbaikan jalan, serta pusat distribusi di beberapa kecamatan telah membantu mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari Kegiatan yang dilakukan TPID, maka kami merumuskan beberapa saran mengenai Pengendalian Inflasi di Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain sebagai berikut:

Memperkuat Produksi dan Ketahanan Pangan Daerah.

- Meningkatkan produksi pangan lokal dengan memberikan insentif kepada petani dan UMKM pangan.
- Mengembangkan lumbung pangan daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga saat musim paceklik.

- Mendorong kerja sama antar-daerah untuk menyeimbangkan pasokan pangan tanpa harus bergantung pada impor dari luar daerah.

Meningkatkan Infrastruktur dan Efisiensi Distribusi.

- Membangun atau memperbaiki pusat logistik dan pasar induk guna menekan biaya distribusi.
- Meningkatkan akses jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api untuk mempercepat pengiriman barang ke daerah terpencil.
- Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pemantauan harga dan marketplace lokal, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.

Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan kebijakan harga, pajak, dan distribusi, agar tidak ada perbedaan kebijakan yang bisa memicu inflasi.
- Meningkatkan dukungan anggaran dan insentif bagi daerah yang berhasil menekan inflasi, agar ada insentif positif untuk kebijakan yang efektif.